

Analisis Kurikulum pada Sistem Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia dan Jepang

Ni Wayan Risna Dewi^{1*}, Ni Luh Ika Windayani¹, Bestari Laia²,
Putu Kerti Nitiasih³, Putu Nanci Riastini³

¹STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Indonesia

²Universitas Nias Raya, Sumatera Utara, Indonesia

³Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*risnadewi@stahnmpukuturan.ac.id

Abstract

Indonesia and Japan have different elementary school curriculum structure policies. This research aims to analyze the structure and implementation of the Japanese curriculum which has been proven to be effective in producing outcomes. The research method used is a literature review with a comparative descriptive study type of research. The data used in this research was obtained from primary and secondary library sources to obtain information and descriptions of research that had been conducted previously. Next, the data obtained is collected, analyzed and concluded to obtain results regarding the literature study. The results of the analysis carried out found similarities and differences in the structure of elementary school education in Indonesia and Japan. This can be assessed from educational policies, learning methods, curriculum structure and character development contained in the curriculum.

Keywords: Curriculum Analysis; Elementary School Education

Abstrak

Indonesia dan Jepang memiliki kebijakan struktur kurikulum sekolah dasar yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan implementasi kurikulum Jepang yang telah terbukti efektif terhadap luaran yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan jenis penelitian studi deskriptif komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pustaka primer dan sekunder untuk mendapatkan informasi dan gambaran dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan untuk memperoleh hasil mengenai studi literatur. Hasil analisis yang dilakukan menemukan adanya persamaan dan perbedaan struktur Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia dan Jepang. Hal ini dapat dinilai dari kebijakan pendidikan, metode pembelajaran, struktur kurikulum dan pembinaan karakter terkandung dalam kurikulum.

Kunci: Analisis Kurikulum; Pendidikan Sekolah Dasar

Pendahuluan

Jepang memang dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia, bahkan memiliki dampak signifikan dalam skala global. Sistem pendidikan Jepang telah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan ini dapat diukur dari prestasi gemilang Jepang dalam tes PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang diselenggarakan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Tes PISA adalah suatu evaluasi yang dilakukan setiap tiga tahun untuk mengukur kinerja siswa dari berbagai negara dalam bidang literasi, matematika, dan sains. Jepang telah menunjukkan

konsistensi yang luar biasa dalam hasil tes PISA selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak hanya mencakup penguasaan materi pelajaran, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa Jepang. Salah satu faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab keberhasilan ini adalah diterapkannya revisi *Course of Study* pada tahun 2008 di Jepang. *Course of Study* adalah kurikulum nasional yang menetapkan standar dan materi pelajaran untuk sekolah dasar dan menengah di Jepang. Revisi ini kemungkinan telah membawa perubahan positif dalam pendekatan pembelajaran, metodologi pengajaran, atau penekanan pada aspek-aspek tertentu yang penting dalam tes PISA.

Selain itu, sumber daya manusia berkualitas yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Jepang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi dan teknologinya. Jepang memiliki tradisi yang kuat dalam mempromosikan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab, yang tercermin dalam pendekatan mereka terhadap pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas ini juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing negara dalam dunia global. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Jepang bukan hanya mencetak siswa yang memiliki pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang esensial untuk menghadapi tantangan di abad ke-21. (Yanuar, 2021). Sejumlah negara, termasuk Indonesia, menjadikan Jepang sebagai pedoman dalam pengembangan sistem pendidikan. Selain memiliki fasilitas yang modern dan lengkap, peran kurikulum pendidikan sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut.

Pengembangan kurikulum memiliki peran krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan suatu negara. Kurikulum tidak hanya mencakup materi pelajaran, tetapi juga mencakup pendekatan pembelajaran, metode evaluasi, dan strategi pengajaran yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sebuah penelitian oleh Wiles dan Bondi (2019) menegaskan bahwa kurikulum yang baik haruslah responsif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan dunia kerja. Implementasi kebijakan kurikulum memiliki dampak signifikan pada seluruh proses pendidikan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Sadiman (2017), perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti karakteristik peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, implementasi kurikulum yang matang dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan relevan. Pentingnya implementasi kurikulum yang tepat juga terkait erat dengan kejelasan dan ketepatan dalam melaksanakan proses pendidikan. Menurut Fullan (2016), sebuah kurikulum yang terstruktur dengan baik akan memberikan panduan yang jelas kepada para pendidik dalam merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, sistem pendidikan dapat menjadi lebih terarah dan efisien. Dalam konteks evaluasi pendidikan, Sadiman (2017) menekankan bahwa implementasi kurikulum yang baik akan memudahkan proses evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan kurikulum, sehingga memungkinkan adanya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan.

Perubahan kurikulum dalam konteks pendidikan Indonesia merupakan fenomena yang tidak terhindarkan. Seiring dengan dinamika zaman, perkembangan teknologi, dan perubahan kondisi sosial, kurikulum harus senantiasa beradaptasi untuk menjawab tantangan zaman. Menurut Fullan dan Stiegelbauer (1991), dinamika perubahan dalam kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga oleh tuntutan masyarakat dan kebutuhan dunia kerja. Secara historis,

perubahan kurikulum di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor kekuasaan politik dan paradigma politik yang berkembang. Menurut Abdillah (2018), pergantian kebijakan kurikulum seringkali terjadi sejalan dengan pergantian menteri pendidikan, menciptakan fenomena yang sering disebut sebagai "ganti menteri ganti kurikulum." Hal ini mencerminkan peran kebijakan pendidikan yang erat kaitannya dengan kebijakan politik di tingkat pemerintahan. Dampak dari seringnya perubahan kurikulum dapat terlihat dalam proses perumusan, pengembangan, dan implementasi kurikulum. Proses ini memerlukan waktu dan upaya yang cukup besar, namun seringkali terganggu oleh perubahan kebijakan. Sebagai hasilnya, mekanisme pelaksanaan kurikulum mungkin tidak optimal, dan praktek pembelajaran menjadi terpengaruh. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Rottenberg (1991), yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan kebijakan kurikulum dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, diperlukan suatu kerangka kerja kebijakan pendidikan yang lebih stabil dan berkelanjutan, agar kurikulum dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, perubahan kurikulum seharusnya lebih terencana dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional.

Fenomena ini menimbulkan minat yang besar untuk melakukan analisis mendalam serta perbandingan struktur kurikulum pendidikan di Indonesia dengan negara maju seperti Jepang. Melalui analisis ini, kita dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan dalam struktur kurikulum pada kedua negara, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Pendekatan ini tidak hanya membuka peluang untuk mengidentifikasi aspek-aspek unik dalam setiap kurikulum, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara tersebut merespon perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan global. Selain itu, perbandingan ini juga dapat memberikan inspirasi untuk peningkatan sistem pendidikan di Indonesia dengan melibatkan praktik terbaik dari negara-negara maju, sehingga dapat menghasilkan kurikulum yang lebih relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika pendidikan global. Analisis ini dapat dilakukan melalui kajian literatur, perbandingan kebijakan pendidikan, serta penelitian empiris dari kedua negara, memberikan kontribusi penting dalam upaya pengembangan dan peningkatan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar.

Jenjang pendidikan dasar menjadi tangga pendidikan formal pertama yang diberikan untuk anak. Pendidikan dasar penting diberikan untuk anak karena didalamnya akan diajarkan tentang dasar dari semua ilmu pengetahuan, sehingga disebut dengan Sekolah Dasar (SD). Mengingat begitu pentingnya pendidikan dasar untuk anak, baik pemerintah Indonesia maupun Jepang mengeluarkan kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Program ini digratiskan oleh pemerintah dan diwajibkan untuk anak menempuh pendidikan di Sekolah Dasar selama enam tahun kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Melalui analisis struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia dengan Jepang, diharapkan dapat memberikan gambaran struktur dan implementasi kurikulum dalam meningkatkan sistem pendidikan dasar di Indonesia serta memetik inspirasi dari praktek baik yang telah terbukti efektif di negara Jepang. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih luas tentang perbandingan kurikulum di tingkat internasional, yang dapat menjadi sumber rujukan berharga bagi pengambil kebijakan, pendidik, dan peneliti dalam upaya untuk terus meningkatkan sistem pendidikan dasar di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan fokus pada penelitian studi deskriptif komparatif melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang sedang diteliti (Creswell & Creswell, 2017). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber perpustakaan, dokumen, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber-sumber ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan keakuratan dan keberagaman informasi yang diperoleh. Penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya menjadi landasan utama dalam pengumpulan data. Kegunaan kajian pustaka dalam penelitian studi deskriptif komparatif telah diakui oleh Ahmadi, Ahmad, dan Ahmadi (2016), yang menjelaskan bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka teoretis yang kokoh dan membandingkan temuan penelitian sebelumnya. Selain itu, metode studi deskriptif komparatif memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara berbagai penelitian yang relevan (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012).

Setelah data terkumpul, tahap analisis dilakukan dengan seksama. Menurut Creswell (2014), analisis kualitatif melibatkan proses merinci, mengorganisir, dan menafsirkan data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian ini berupaya menghasilkan temuan yang signifikan dan memberikan sumbangan berharga terhadap studi literatur yang telah ada. Data yang menjadi dasar penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai sumber yang relevan. Data sekunder ini merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, namun memiliki kegunaan signifikan sebagai pendukung dalam melaksanakan penelitian ini. Sejalan dengan definisi data sekunder, metode ini memanfaatkan informasi yang telah ada dan terkait dengan penelitian mengenai kurikulum dalam sistem pendidikan dasar di Indonesia dan Jepang. Proses pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui catatan-catatan dari penelitian terdahulu, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan berita yang tersebar di media massa. Menurut Flick (2018), penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang topik penelitian. Dengan merinci referensi dari penelitian sebelumnya, terdapat potensi untuk mengeksplorasi perkembangan kurikulum dalam konteks pendidikan dasar di dua negara tersebut. Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga tahapan yang dilakukan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), proses analisis data yang komprehensif melibatkan langkah-langkah tersebut untuk mengorganisir dan menginterpretasikan informasi yang telah terkumpul. Dengan demikian, hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan dalam struktur kurikulum pada tingkat pendidikan dasar di Indonesia dan Jepang.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan sistem pendidikan di Indonesia tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan landasan hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia. UU Sisdiknas juga menjadi acuan dasar dalam pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin sistem pendidikan nasional yang mampu memberikan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, hingga relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan secara terarah, terencana, serta berkesinambungan. Melalui UU Sisdiknas ini, ditetapkan juga terkait ketentuan yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang telah berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Program wajib belajar ini

merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan bersama. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) tanpa memungut biaya.

Sistem pendidikan Jepang mengalami perkembangan signifikan pada periode zaman *Meiji*, yang berlangsung dari tahun 1868 hingga tahun 1912. Era *Meiji* merupakan tonggak penting dalam transformasi Jepang menjadi negara industri modern, dan reformasi dalam bidang pendidikan memainkan peran krusial dalam pencapaian tujuan tersebut. Menurut Nishimura (1998), pemerintahan *Meiji* melihat perlunya sistem pendidikan yang modern untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi Jepang. Salah satu langkah penting dalam reformasi pendidikan era *Meiji* adalah penerapan kebijakan pendidikan wajib, dikenal sebagai "*gimu kyouiku*." Kebijakan ini memberikan akses pendidikan kepada seluruh warga negara Jepang, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan terampil. Langkah ini sejalan dengan konsep pendidikan wajib yang diadopsi oleh banyak negara di dunia (Tsuchiya, 1990). Upaya pemerintah *Meiji* dalam memodernisasi sistem pendidikan juga tercermin dalam kebijakan pengiriman pelajar Jepang ke negara-negara barat. Hal ini dilakukan untuk memberikan para pelajar pengalaman belajar di lingkungan pendidikan barat yang maju. Menurut Tsukahara (2015), program ini bertujuan untuk mengimpor pengetahuan dan keterampilan baru yang diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan industri dan modernisasi Jepang.

Selain mengirim pelajar ke luar negeri, pemerintah *Meiji* juga menerapkan kebijakan "*oyatoi gaikokujin*," yaitu mendatangkan tenaga pengajar dari luar negeri. Pengajar asing ini membawa serta pemikiran dan metode pendidikan barat yang kemudian diadopsi dalam sistem pendidikan Jepang. Hal ini menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sejalan dengan pemikiran pendidikan modern yang tengah berkembang di negara-negara barat pada waktu itu (Smith, 1997). Dengan demikian, era *Meiji* menjadi landasan penting dalam pembentukan sistem pendidikan Jepang yang modern. Penerapan kebijakan pendidikan wajib, program pengiriman pelajar ke luar negeri, dan kedatangan tenaga pengajar asing membuka jendela bagi Jepang untuk mengadopsi dan mengintegrasikan berbagai konsep dan metode pendidikan yang membentuk dasar sistem pendidikan mereka hingga saat ini. Pada zaman *Meiji*, kebijakan politik dalam modernisasi sistem pendidikan Jepang dapat diketahui dengan dilaksanakannya sistem pendidikan yang disebut dengan *Gakusei*. Departemen Pendidikan Jepang mengeluarkan sistem pendidikan tersebut pada tahun 1872 yang memuat rencana sistem pendidikan secara umum. Dimasa ini pembagunan fasilitas pendidikan dilakukan secara masal, mulai dari sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi. Selanjutnya pada tahun 1879, sistem ini disempurnakan dengan sistem *Kyouikurei*. Sistem *Kyouikurei* memuat aturan untuk menerapkan desentralisasi pendidikan dengan mengizinkan pemerintah daerah membangun sarana pendidikan dan membuat kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah setempat.

Konstitusi Jepang menegaskan bahwa dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional dasar, semua individu memiliki hak yang sama untuk menerima layanan pendidikan sesuai dengan kapasitas mereka, sebagaimana diatur oleh hukum. Tanpa memandang perbedaan gender, kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa setiap anak wajib menerima layanan pendidikan yang disediakan secara cuma-cuma, tanpa dikenakan biaya apapun. Pada bulan Maret 1947, Undang-Undang Pendidikan mulai diberlakukan, menyusun secara lebih rinci prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan yang sejalan dengan semangat konstitusi, termasuk aspek kesempatan yang sama, kewajiban belajar, pendidikan formal, pendidikan sosial, larangan terhadap pendidikan politik partai,

larangan pendidikan agama di sekolah umum nasional dan lokal, serta larangan pengaruh yang tidak pantas pada pendidikan. Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Undang-Undang Pendidikan mengalami revisi pada tanggal 15 Desember 2006. Revisi tersebut, meskipun mengikuti perkembangan zaman, tetap mempertahankan prinsip-prinsip universal yang telah ditanamkan dalam versi sebelumnya. Prinsip-prinsip ini menempatkan nilai sebagai landasan utama, menunjukkan komitmen masyarakat Jepang untuk memiliki dan menghormati tradisi serta budaya yang telah membentuk dasar sebelumnya. Upaya untuk menjamin kesempatan warga negara akan pelayanan pendidikan dasar serta memastikan standar Pendidikan yang memadai, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya wajib belajar melalui pembagian peran yang tepat dan kerja sama yang baik. Selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah, adanya tanggung jawab dan kerja sama yang baik antara orang tua, sekolah serta masyarakat setempat memegang peran penting dalam memaksimalkan pendidikan di Jepang.

Sistem pendidikan Indonesia, sejalan dengan pendekatan yang diterapkan di Jepang, juga sangat menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter. Dari tingkat sekolah dasar, peserta didik diperkenalkan dengan Mata Pelajaran Agama dan Moral, yang dirancang untuk membekali mereka dengan nilai-nilai moral dan etika yang mendasar. Materi ini mencakup aspek-aspek kunci seperti kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, nasionalisme, toleransi, serta tenggang rasa. Keberadaan Mata Pelajaran Agama dan Moral ini mencerminkan tekad untuk mengembangkan perilaku positif dan membentuk karakter yang kuat sejak dini. Program dan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar di Indonesia tentunya mengacu pada kurikulum yang berlaku saat itu. Kurikulum ini secara umum mencakup berbagai mata pelajaran untuk memastikan peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif. Adapun Mata Pelajaran Agama dan Moral memberikan fondasi nilai-nilai etika dan moral yang menjadi bagian integral dari pendidikan karakter. Namun, perlu dicatat bahwa sistem pendidikan Indonesia sering kali mengalami perubahan kurikulum dari waktu ke waktu, dan hal ini mendapat sorotan dari beberapa pihak. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai alasan dan rasionalisasi, yang mungkin melibatkan tuntutan perkembangan zaman, kebutuhan industri, atau penyesuaian dengan standar internasional. Meskipun perubahan kurikulum dapat menjadi respons terhadap dinamika sosial dan global, beberapa kalangan menganggap bahwa ketidakstabilan kurikulum dapat berdampak pada kualitas pendidikan. Menurut Nurlaela dan Wulandari (2018), implementasi Mata Pelajaran Agama dan Moral di Indonesia bertujuan untuk membentuk karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan moral, sejalan dengan semangat pembentukan generasi yang berkualitas. Meskipun demikian, pemikiran kritis dan evaluasi terhadap perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.

Kebijakan mengenai Pendidikan Dasar di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990. Pasal 14 dari peraturan tersebut secara rinci menjelaskan tentang kurikulum Pendidikan Dasar, yang merupakan elemen inti dalam mencapai tujuan Pendidikan Dasar. Kurikulum ini dirancang untuk menyusun bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan dasar yang telah ditetapkan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum Pendidikan Dasar di Indonesia harus mencakup sejumlah mata pelajaran yang beragam dan mencakup aspek-aspek penting pembentukan karakter peserta didik. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat setidaknya bahan kajian dan pelajaran berikut: Pendidikan Pancasila; Pendidikan Agama; Pendidikan Kewarganegaraan;

Bahasa Indonesia; Membaca dan Menulis; Matematika (termasuk berhitung); Pengantar Sains dan Teknologi; Ilmu Bumi; Sejarah Nasional dan Sejarah Umum; Kerajinan Tangan dan Kesenian; Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; Menggambar; serta Bahasa Inggris.

Adanya ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa peserta didik menerima pendidikan yang holistik, mencakup aspek agama, moral, dan kewarganegaraan, serta penguasaan berbagai keterampilan dasar. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus menjadi wahana untuk pembentukan karakter dan persiapan peserta didik dalam menghadapi kehidupan. Meskipun ada kurikulum nasional yang telah ditetapkan, Pasal 14 juga memberikan ruang bagi Satuan Pendidikan Dasar untuk menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan pendidikan yang memperhitungkan keberagaman setiap satuan pendidikan. Terkait dengan perubahan kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menetapkan kebijakan perubahan kurikulum umumnya setiap lima tahun. Sifat dinamis kurikulum memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Meskipun begitu, perubahan ini bisa saja terjadi lebih cepat atau lebih lambat tergantung pada evaluasi dan kebutuhan pendidikan yang bersifat lokal maupun nasional. Menurut (Yuliyanti et al., 2022) perkembangan kurikulum di Indonesia dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Tahun	Kurikulum	Deskripsi
1947	Rentjana Pelajaran 1947	Kurikulum pertama yang diterapkan setelah kemerdekaan adalah kurikulum 1947. Perubahan arah dalam bidang pendidikan lebih bersifat politis, dengan fokus utama pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum ini baru secara resmi diterapkan di sekolah-sekolah pada tahun 1950.
1952	Rentjana Pelajaran 1952	Kurikulum 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hal yang paling mencolok adalah penerapan konsep tematik. Dengan kata lain, setiap rencana pelajaran diharapkan memperhatikan materi pelajaran dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari.
1964	Rentjana Pelajaran 1964	Isu yang dikembangkan dalam kurikulum ini adalah ide pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Dalam kerangka konsep ini, pemerintah menetapkan bahwa hari Sabtu dijadikan hari krida, di mana siswa diberikan kebebasan untuk berlatih dalam berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakat individu mereka. Dalam kurikulum ini, pendekatan pembelajaran difokuskan pada program Pancawardhana, yang mencakup pengembangan aspek moral, kecerdasan, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan praktis, dan aspek jasmani.

1968	Kurikulum Tahun 1968	Masuk ke era Orde Baru, pembentukan kurikulum ini juga memiliki dimensi politis. Fokus utamanya adalah meningkatkan aspek mental, moral, budi pekerti, dan keberagamaan. Karakteristik khusus dari kurikulum 1968 adalah <i>correlated subject curriculum</i> , yang berarti materi pada tingkat pendidikan dasar memiliki keterkaitan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
1975	Kurikulum Tahun 1975	Pembentukan kurikulum ini dipicu oleh sejumlah perubahan dalam konteks pembangunan nasional. Metode, isi, dan tujuan pengajaran dijelaskan secara rinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Terdapat sejumlah modifikasi dalam kurikulum ini, di antaranya adalah perubahan nama mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat menjadi Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya, mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur diubah menjadi satu mata pelajaran, yaitu Matematika.
1984	Kurikulum Tahun 1984	Kurikulum ini diperkenalkan sebagai respons terhadap ketidakmampuan kurikulum 1975 untuk mengikuti perkembangan cepat masyarakat. Salah satu karakteristik utamanya adalah penekanan yang lebih besar pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Pendekatan ini dikenal sebagai Pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).
1994	Kurikulum Tahun 1994	Pada tahun 1994, pemerintah melakukan penyempurnaan pada kurikulum sebagai bagian dari usaha untuk mengintegrasikan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah penggantian sistem pembagian waktu pelajaran dari semester menjadi caturwulan.
2004	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	Pada tahun 2004, diperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai pengganti Kurikulum 1994. KBK merupakan program pembelajaran yang berfokus pada penguasaan kompetensi dengan tiga elemen inti, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, penentuan indikator evaluasi untuk mengukur pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Konsekuensinya, sekolah diberikan wewenang untuk mengembangkan komponen kurikulum yang sesuai dengan keadaan dan

		kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kurikulum yang sebelumnya berorientasi pada materi diubah menjadi berorientasi pada penguasaan kompetensi.
2006	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	Kurikulum ini dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan mulai berlaku seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Perbedaan utama kurikulum ini terletak pada pemberian kewenangan dalam penyusunannya, yang mengikuti prinsip desentralisasi dalam sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sementara guru diharapkan mampu mengembangkan silabus dan penilaian sendiri sesuai dengan kondisi sekolah dan wilayahnya. Pada garis besar, tujuan dari kurikulum ini adalah memberikan otonomi dan pemberdayaan kepada satuan pendidikan melalui pendelegasian kewenangan kepada lembaga-lembaga pendidikan.
2013	Kurikulum 2013	Kurikulum 2013 menempatkan penekanan yang lebih besar pada pendidikan karakter. Dalam implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam semua materi pelajaran di setiap bidang studi. Kurikulum ini juga menyoroti pembentukan sikap spiritual melalui Kompetensi Inti 1 (KI 1) dan sikap sosial melalui Kompetensi Inti 2 (KI 2). Ciri khas dari kurikulum ini mencakup penilaian yang berfokus pada pembentukan karakter, pendekatan pembelajaran berbasis tematik, dan peran guru sebagai fasilitator.
2022	Kurikulum Merdeka	Kurikulum 2022 menitikberatkan pada materi yang esensial dan mengurangi kepadatan materi. Tujuannya adalah memberikan waktu lebih bagi guru untuk fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi. Meskipun begitu, pelaksanaan kurikulum terbaru ini diserahkan kepada otonomi masing-masing sekolah. Dalam kurikulum Merdeka, diperkenalkan program Guru Penggerak, di mana guru-guru yang terpilih akan memiliki tugas untuk memotivasi dan menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan lingkungan sekitarnya.

Perubahan kurikulum berdampak positif dan dampak negatif bagi mutu pendidikan. dampak positifnya, siswa bisa belajar dengan mengikuti tren perkembangan zaman yang semakin maju dengan dukungan semua pihak seperti pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat. Sementara dampak negatifnya adalah, kebijakan perubahan kurikulum yang begitu cepat membuat mutu pendidikan bisa menurun serta dapat menimbulkan masalah-masalah seperti menurunnya prestasi siswa dikarenakan siswa belum siap beradaptasi dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru (Halawa 2023). Ketika kurikulum dirumuskan, dikembangkan, dan diimplementasikan di setiap sekolah, tentunya mekanisme pelaksanaan juga akan mempengaruhi praktek pembelajaran yang selanjutnya berdampak terhadap hasil belajar siswa. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjamin sepenuhnya bahwa perangkat pendidikan akan mengimplementasikan kebijakan kurikulum sesuai dengan harapan pemerintah. Dampak dari kurikulum pendidikan yang berubah-ubah ini bukan hanya berimbas pada guru dan siswa saja, melainkan juga dapat berdampak pada kacaunya visi, misi dan tujuan sekolah itu sendiri.

Berbeda dengan Indonesia, di Jepang, kurikulum sekolah disusun oleh bagian perencanaan kurikulum yang terdapat dalam Kementerian Pendidikan (*MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology*). Komisi kurikulum ini terdiri dari berbagai pihak, seperti wakil dari *Teacher Union*, praktisi dan pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil dari MEXT. Tugas utama komisi ini adalah mempelajari tujuan pendidikan Jepang yang terdapat dalam *Fundamental Education Law (Kyouiku Kihonhou)* dan menyesuaikannya dengan tren perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Proses penyusunan kurikulum melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk perwakilan guru, praktisi pendidikan, dan pihak industri, untuk memastikan relevansi dan kualitas kurikulum. Pemerintah Jepang melakukan pembaharuan kurikulum setiap 10 tahun sekali, mencerminkan komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan perkembangan zaman.

Kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah di Jepang adalah kurikulum yang telah disusun dan distandarkan secara nasional. Meskipun demikian, setiap sekolah diberikan kebebasan untuk merancang kurikulumnya sendiri. Kebebasan ini mencakup desain kurikulum untuk mata pelajaran pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus dari masing-masing sekolah. Pendekatan ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik peserta didik. Prinsip yang digunakan dalam struktur kurikulum sekolah di Jepang yakni *Chi-Toku-Tai*. Prinsip ini relevan dengan dengan tiga domain pengetahuan yang dicetuskan oleh Bloom yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik (Irawati, 2022). Dalam prinsi tersebut, *Chi* diartikan sebagai pengetahuan akademik, *Toku* berarti aspek pengembangan nilai, emosi dan karakter siswa, sementara *Tai* artinya sama dengan tubuh (fisik/jasmani) yang sehat. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh terhadap kebijakan kurikulum nasional, namun masing-masing sekolah juga diberikan beberapa kebebasan. Dari segi fasilitas pendukung, Sekolah Dasar di Jepang harus memiliki fasilitas olahraga luar ruangan, ruang stadion indoor, kolam renang, ruang musik, ruang memasak, ruang menggambar, laboratorium komputer, dan perpustakaan yang sama (Irawati, 2022)

Sekolah Dasar di Jepang dikelola oleh seorang kepala sekolah yang memiliki pengetahuan mendalam dalam semua mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Struktur sekolah dasar di Jepang terbagi menjadi kelas bawah (kelas 1-3) dan kelas atas (kelas 4-6). Kurikulum di kelas bawah difokuskan pada mata pelajaran seperti Bahasa Dasar, Aritmetika, Musik, Seni, Kerajinan, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, dan Bahasa Jepang. Pada tingkat kelas 1 sampai kelas 2, siswa belajar operasi hitung sederhana seperti perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan secara berulang

hingga mereka memahami konsep tersebut dengan baik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membangun dasar kemampuan matematika dan memastikan pemahaman yang kuat sebelum mereka melanjutkan ke tingkat berikutnya.

Dalam konteks pelajaran Bahasa dan keaksaraan di Jepang, pendidikan selalu mempertahankan keberlanjutan budaya, terutama dalam penggunaan Bahasa Jepang dan tulisan *Kanji*. Mata pelajaran Bahasa dan keaksaraan Jepang diajarkan sejak kelas satu. Pada tingkat ini, siswa diharuskan menghafal dan mampu menulis 80 huruf *Kanji*. Pada tingkat kelas dua, keterampilan menulis huruf *Kanji* yang diharapkan meningkat menjadi 150 huruf. Pendidikan di Sekolah Dasar juga mencakup mata pelajaran *Seikatsuka* (kebiasaan hidup) yang diberikan kepada anak-anak kelas 1 dan 2. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pada kelas rendah, pendekatan pembelajaran lebih fokus pada kegiatan bermain daripada aktivitas belajar di dalam kelas. Selanjutnya, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diajarkan mulai dari kelas tiga, sementara tidak ada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran berikutnya adalah life skill, yang bertujuan untuk mengajarkan kemandirian kepada siswa. Siswa kelas tiga ke atas belajar tentang permasalahan sosial melalui kursus terpadu. Kegiatan kursus terpadu sering dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar langsung di tempat-tempat tertentu, seperti toko roti, rumah siswa, pertanian di sekitar sekolah, atau lingkungan alam seperti pegunungan, sungai, dan sumber air. Pelajaran Bahasa Jepang dianggap sangat penting dan wajib, sehingga siswa kelas bawah memerlukan lebih banyak waktu untuk belajar daripada siswa kelas atas. Terakhir, pembelajaran Bahasa Inggris diajarkan di kelas 5 dan 6.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Struktur Kurikulum di Indonesia dan Jepang

Aspek	Indonesia	Jepang
Kebijakan Pendidikan	Wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar dan menengah dimulai ketika anak berusia 7 tahun hingga 16 tahun.	Wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun
Metode Pembelajaran	Menggunakan metode saintifik (mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengomunikasikan)	Menggunakan metode belajar tutor sebaya (<i>peer learning</i>) atau yang disebut <i>Lesson Study</i>
Struktur kurikulum	Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Membaca dan Menulis, Matematika (termasuk berhitung), Pengantar Sains dan Teknologi, Ilmu Bumi, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Menggambar, Bahasa Inggris. Satuan Pendidikan Dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang	Sekolah di Jepang sedikit mempunyai kebebasan meramu sendiri kurikulum mata pelajaran sekolah. Mata pelajaran yang diajarkan adalah Bahasa Dasar, Aritmatika, Musik, Seni, Kerajinan, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, IPA, <i>Seikatsuka</i> (kebiasaan hidup) dan <i>life skill</i> serta permasalahan sosial melalui kursus terpadu (<i>outing class</i>)

	berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.	
	Ujian kenaikan kelas yang dilakukan setiap semester/tahun pada setiap jenjang pendidikan.	Tidak ada ujian kenaikan kelas pada jenjang pendidikan dasar
	Adanya Ujian Akhir Nasional yang digunakan untuk menentukan kelulusan siswa SD	Tidak ada ujian nasional untuk menentukan kelulusan.
	Sistem penilaian menggunakan penilaian dengan acuan KKM. KKM merupakan batas kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai siswa untuk dapat dikategorikan lulus. Apabila terdapat siswa yang belum memenuhi KKM, dilakukan pembelajaran remedial.	System penilaian ulangan adalah dengan menggunakan huruf A, B, dan C untuk semua mata pelajaran kecuali matematika. Untuk kelas 4 hingga kelas 6, dilakukan tes <i>IQ</i> untuk melihat kemampuan dasar siswa. Hasil tes ini digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan perhatian lebih kepada siswa-siswanya terutama bagi siswa yang kemampuannya di bawah normal.
Pembinaan Karakter	Dalam Pendidikan Agama dimuat Pendidikan karakter untuk memupuk perilaku baik seperti kejujuran, kedisiplinan dan tenggang rasa.	Prinsip <i>Chi-Toku-Tai</i> <i>Chi</i> diartikan sebagai pengetahuan akademik, <i>Toku</i> diartikan sebagai aspek pengembangan nilai, emosi dan karakter siswa, <i>Tai</i> artinya sama dengan tubuh yang sehat.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan terkait struktur Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia dan Jepang. Kedua negara, baik Indonesia maupun Jepang, memiliki kebijakan yang mewajibkan warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan Pendidikan Wajib belajar selama sembilan tahun yang diberikan secara gratis. Persamaan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat. Namun, perbedaan yang mencolok muncul dalam metode pembelajaran, struktur kurikulum, dan pembinaan nilai karakter. Di Indonesia, metode pembelajaran yang umum digunakan adalah metode saintifik, yang melibatkan serangkaian langkah seperti mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Di sisi lain, Jepang mengadopsi metode belajar tutor sebaya (*peer learning*) atau yang dikenal sebagai *Lesson Study*. *Lesson Study* merupakan pendekatan kolaboratif di mana guru bekerja sama untuk merancang, mengamati, dan mengevaluasi pembelajaran secara berkelanjutan.

Selain itu, perbedaan signifikan juga terlihat dalam struktur kurikulum. Indonesia memiliki kerangka kurikulum nasional yang memandu penyusunan kurikulum di setiap tingkatan pendidikan. Di Jepang, meskipun ada kurikulum nasional, setiap sekolah memiliki fleksibilitas untuk merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Struktur kurikulum pada kedua negara, Indonesia dan Jepang, menjadi fokus analisis terkait mata pelajaran, pelaksanaan ujian kenaikan kelas,

ujian akhir nasional, dan sistem penilaian. Indonesia menerapkan model kurikulum yang mengharuskan semua anak mengikuti semua mata pelajaran wajib, termasuk mata pelajaran tambahan yang disesuaikan dengan muatan lokal yang relevan dengan daerah setempat. Pendekatan ini mencerminkan keragaman budaya dan kebutuhan lokal yang diakomodasi dalam kurikulum nasional. Di sisi lain, Jepang memiliki struktur kurikulum yang lebih terstandar secara nasional untuk mata pelajaran wajib, termasuk tambahan mata pelajaran seperti *Seikatsuka* (kebiasaan hidup) dan *life skill*. Pengenalan mata pelajaran seperti *life skill* dan *Seikatsuka* menunjukkan penekanan pada pembentukan karakter dan kemandirian siswa. Selain itu, pelajaran mengenai permasalahan sosial diajarkan melalui kursus terpadu atau *outing class*, di mana siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung di berbagai tempat di luar kelas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk menentukan muatan lokal tambahan, sementara Jepang lebih memusatkan perhatian pada aspek pengembangan karakter, kemandirian, dan penanganan permasalahan sosial melalui pendekatan kurikulum nasional yang lebih terstandar.

Sistem penilaian dan ujian kenaikan kelas di kedua negara juga dapat menjadi titik analisis selanjutnya untuk memahami secara menyeluruh perbedaan dan persamaan dalam struktur pendidikan antara Indonesia dan Jepang. Di Indonesia, siswa diwajibkan mengikuti ujian kenaikan kelas setiap semester atau tahun pada semua jenjang pendidikan, serta menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) yang menentukan kelulusan siswa Sekolah Dasar (SD). UAN memiliki peran krusial dalam menentukan apakah siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Sistem penilaian Indonesia menggunakan acuan Ketuntasan Minimal (KKM), di mana siswa diharapkan memenuhi standar minimal yang ditetapkan untuk setiap mata pelajaran. Jika ada siswa yang belum mencapai KKM, mereka akan mendapatkan pembelajaran remedial. Sebaliknya, di Jepang, tidak ada ujian kenaikan kelas maupun ujian akhir nasional. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai huruf A, B, dan C untuk semua mata pelajaran kecuali matematika. Untuk siswa kelas 4 hingga kelas 6, dilakukan tes *IQ* untuk mengevaluasi kemampuan dasar siswa. Hasil tes *IQ* ini menjadi panduan untuk memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang mungkin memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Pendekatan ini menunjukkan perhatian khusus terhadap keberagaman kemampuan siswa dan memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang membutuhkannya. Perbedaan ini mencerminkan strategi evaluasi yang berbeda antara Indonesia yang lebih memfokuskan pada ujian kenaikan kelas dan ujian akhir nasional sebagai penentu kelulusan, sementara Jepang menekankan penilaian berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan individual siswa melalui tes *IQ* dan penilaian huruf. Hal ini menjadi aspek penting dalam memahami dinamika pendidikan di kedua negara.

Dalam konteks pembinaan karakter atau perilaku, Indonesia dan Jepang memiliki pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, Pendidikan Agama menjadi landasan untuk memupuk nilai-nilai karakter siswa, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tenggang rasa. Pendidikan karakter di Indonesia secara khusus terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, di mana siswa diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam membentuk kepribadian yang baik. Sementara itu, Jepang menerapkan Prinsip *Chi-Toku-Tai* dalam pembinaan karakter siswa. Prinsip ini terdiri dari tiga elemen, yaitu *Chi*, *Toku*, dan *Tai*. *Chi* diartikan sebagai pengetahuan akademik, yang mencakup aspek intelektual dan kognitif siswa. *Toku* diartikan sebagai aspek pengembangan nilai, emosi, dan karakter siswa. Hal ini menekankan pada pembentukan karakter yang baik dan etika yang kuat. Terakhir, *Tai* memiliki makna tubuh yang sehat, yang menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental siswa sebagai bagian integral dari pembinaan karakter. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan nilai-

nilai dan prioritas yang ditekankan oleh masing-masing negara dalam mendidik generasi muda. Di Indonesia, nilai-nilai moral diajarkan melalui pendekatan agama, sementara di Jepang, Prinsip *Chi-Toku-Tai* menggambarkan pendekatan yang holistik dalam pengembangan karakter siswa yang mencakup aspek pengetahuan, nilai, dan kesehatan fisik.

Kesimpulan

Indonesia dan Jepang memiliki fokus serupa dalam pengembangan sistem pendidikan, terutama pada jenjang Pendidikan Dasar. Keduanya menerapkan kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan tahun yang diberikan secara gratis. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam metode pembelajaran, struktur kurikulum, dan pembinaan karakter. Di Indonesia, kebijakan kurikulum sering mengalami perubahan, yang dapat berdampak negatif terhadap mutu pendidikan dan hasil belajar siswa karena perangkat sekolah belum sempat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Meskipun pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk memasukkan kurikulum lokal, kurikulum tersebut cenderung tidak sepenuhnya relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, terbatas pada bahasa daerah, seni, dan budaya lokal. Sementara itu, di Jepang, pemerintah memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk menyesuaikan struktur kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran tambahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dari perbedaan tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengadopsi beberapa aspek struktur dan implementasi kurikulum Jepang guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, sehingga dapat bersaing dengan negara maju seperti Jepang.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. H. (2018). *Paradigma Pendidikan Nasional dan Implementasinya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications;
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research (6th ed.)*. California: Sage Publications;
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education (8th ed.)*. New York: Mc Graw Hill.
- Fullan, M. (2016). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Halawa, D. P., Telaumbanua, M. S., & Buulolo, D. (2023). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia Dan Jepang. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora*, 6(1), 12-23.
- Hanggoro, D. (2022). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Sistem Pendidikan Jepang: Memajukan Pendidikan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, 3(2), 363-373.
- Irawati, H., & Maulidiyah, A. (2022). Belajar Pendidikan Dasar pada Sekolah di Jepang. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 602-608.
- McGraw-Hill; Ahmadi, S., Ahmad, S., & Ahmadi, M. (2016). A Comparative Study of Using Thematic, Open and Axial Coding in Content Analysis. *Indian Journal of Science and Technology*, 9(30) 1-9
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. California: Sage Publications
- Montanesa, D., & Firman, F. (2021). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Jepang. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 3(1), 174-179

- Montanesa, D., & Firman, F. (2021). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Jepang. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 174-179.
- Nurlaela, L., & Wulandari, A. D. (2018). Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Agama dan Moral di Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (SNP)*. (Vol. 1, No. 1)
- Rahayu, S. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Isema Islam. Educ. Manag.* 2(4), 77-92
- Sadiman, A. S. (2017). *Pendidikan Dasar: Pendekatan Integratif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Simanjuntak, J., Sihombing, S., Purba, T. N., Hutauruk, A., & Panjaitan, S. (2021). Analysis of Mathematics Education Learning Activities During the COVID-19 Pandemic in Asian Countries (Indonesia, Japan and the Philippines). *Sepren: Journal of Mathematics Education and Applied*, 2(2), 47-55
- Smith, R. (1997). Foreign Teachers and Americanization In Meiji Japan. *American Quarterly*, 49(2), 272-305)
- Syakhrani, A. W., Norman, N., Ramadan, R. S., & Rahmadani, R. (2022). Sistem Pendidikan di Negara Indonesia. *Adiba: Journal of Education*, 2(3), 386-398
- Tsuchiya, T. (1990). *Education Reform in Japan: A Case of Immobilist Politics*. London: Routledge
- Tsukahara, T. (2015). The Rise of Oyatoi Gaikokujin: the Influx of Foreign Teachers During The Meiji Period. *Historical Studies in Education*, 27(1), 78-96
- Wiles, J., & Bondi, J. (2015). *Curriculum Development: A Guide to Practice*. London: Pearson Education
- Yanuar, R. F. (2021). Studi Komparasi Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia dan Jepang. *Jurnal Dharma PGSD*, 1(2), 146-161.
- Yata, C., Ohtani, T., & Isobe, M. (2020). Conceptual framework of STEM based on Japanese subject principles. *International Journal of STEM Education*, 7(1), 1-10.
- Yuliyanti, Y., Damayanti, E., & Nulhakim, L. (2022). Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar di Indonesia dan Perbedaan Dengan Kurikulum Di Beberapa Negara. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(3), 95-106.